



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1525



TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 .

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk Periode 3 (tiga) bulan melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026.

Penyusunan Dokumen ini dalam rangka meningkatkan Pengawasan secara tepat dan terarah dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan sebagai panduan untuk melaksanakan penyesuaian perkembangan kebutuhan tahun 2024 berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan.

Batam, 05 Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batam



Dr. H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si

NIP. 19690830 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.4
1.4 Sistematika Penulisan	I.5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN BERKENAAN	II.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disperindag Tahun sampai degan Triwulan II	II.1
2.2 Analisis Kinerja Penalayanan Disperindag	II.15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II.17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II.22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.45
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	III.1
BAB IV PENUTUP	IV.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan, meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja

Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbangda dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan, Bapelitbangda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L embaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).
12. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1424)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan tolak ukur penilaian kinerja serta mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada tahun 2024.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah:

- Mengetahui kondisi umum pembangunan Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2024;
- Mengetahui kebijakan pembangunan Kota Batam yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2024;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang berpedoman pada Rencan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022.
- Sebagi pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

dalam menjalankan tugas dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM SAMPAI DEGAN TW II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sampai denganTW II Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja Tahun 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagai bahan acuan. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam di dasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana Indikator program dan target Renstra SKPD telah di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Sampai dengan triwulan II penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sudah berjalan dengan baik dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam table 2.1 dan Tabel 2.2 :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

N O	K O D E	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPKD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp
																			KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								139.765.062.807			50.700.857.292			43.853.504.329		28.981.309.707		9.366.027.225		16.192.735.381		28.981.309.707					
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								125.070.906.632			41.802.966.088			34.709.194.979		23.501.041.807		6.739.899.405		12.496.474.561		23.501.041.807					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah					Persen	100	74.102.569.674	Persen	100	22.759.396.647	Persen	100	14.353.028.711	100	13.251.197.239	25	2.217.210.699	25	6.990.952.140	100	13.251.197.239	100	92			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi				Persen	100	61.399.359.525	Persen	100	19.505.945.395	Persen	100	12.409.799.155	100	12.229.006.644	25	2.049.491.447	25	6.576.812.896	100	12.229.006.644	100	99			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	56	60.859.589.525	Orang/ Bulan	56	19.348.821.395	Orang/ Bulan	70	12.308.099.155	70	12.229.006.644	70	2.049.491.447	74	6.576.812.896	70	12.229.006.644	100	99			

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KET ERAN GAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	539.770.000	Dokumen	2	157.124.000	Dokumen	1	101.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana			Persen	100	263.461.562	Persen		0	Persen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0			
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	263.461.562	Paket		0	Paket	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persen	100	2.047.437.225	Persen	100	331.887.976	Persen	100	449.662.380	100	51.954.000	25	5.000.000	25	15.285.600	100	51.954.000	100	12					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20.468.400	Paket	2	10.574.000	Paket	2	20.274.880		0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	804.714.300	Paket	3	172.564.630	Paket	3	134.622.500	3	16.226.000	1	5.000.000	2	7.950.000	3	16.226.000	100	12					

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN				
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17				
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	94.285.525	Paket	2	20.936.000	Paket	4	86.848.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0			
						Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	126.250.000	Paket	2	29.804.000	Paket	2	22.077.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0			
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokum en	5	43.200.000	Dokumen	2	9.600.000	Dokumen	2	7.200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0			
						Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	958.519.000	Laporan	5	88.409.346	Laporan	10	178.640.00 0	10	35.728.000	0		2	7.335.600	10	35.728.000	100	20					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			Persen	100	1.071.372.2 62	Persen	100	294.660.00 0	Persen	100	208.675.00 0		0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0				
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	24	304.807.506	Paket	18	100.510.00 0	Paket	35	46.865.000		0	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0			

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp
																			KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44	766.564.756	Unit	18	194.150.000	Unit	18	161.810.000		0			0	0	0	0	#DIV/0!	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			Persen	100	7.930.274.900	Persen	100	2.502.687.976	Persen	100	964.352.176	100	689.106.595	25	154.859.252	25	356.795.644	100	689.106.595	100	71			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	7.930.274.900	Laporan	2	2.502.687.976	Laporan	1	964.352.176	1	689.106.595	1	154.859.252	1	356.795.644	1	689.106.595	100	71			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi			Persen	100	1.390.664.200	Persen	100	124.215.300	Persen	100	320.540.000	100	281.130.000	25	7.860.000	25	42.058.000	100	281.130.000	100	88			

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp
																			KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	242.826.000	Unit	2	35.929.900	Unit	1	39.780.000	1	39.780.000	1	1.000.000	1	13.427.000	1	39.780.000	100	100			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	872.098.200	Unit	12	66.545.400	Unit	12	237.820.000	12	237.820.000	12	6.500.000	12	26.173.000	12	237.820.000	100	100			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	360	266.740.000	Unit	30	20.300.000	Unit	44	41.440.000	44	2.030.000	0		40	1.738.000	44	2.030.000	100	5			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	9.000.000	Unit	2	1.440.000	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	1	360.000	1	720.000	1	1.500.000	100	100			
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti					Persen	100	350.000.000	Persen		0	Persen		99.115.000		0		0		0		0	#DIV/0!	0			

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETETERAN GAN				
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17				
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota																										
						Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persen	100	200.000.000	Persen		0	Persen	100	49.897.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0			
								Laporan	6	200.000.000	Laporan			Laporan	2	49.897.000		0	0		0				0	0	#DIV/0 !	0			
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten /Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu																				0	0	#DIV/0 !	0			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Persen	100	150.000.000	Persen		0	Persen	100	49.218.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0			
								Dokumen	9500	150.000.000	Dokumen			Dokumen	8.500	49.218.000		0	0		0				0	0	#DIV/0 !	0			

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
		PROGRAM PENINGKATA N SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG AN	Persentas e Sarana Distribusi Perdagang an yang berkualita s Baik					Persen	50,94	4.000.000.0 00	Persen	30	1.573.885.0 59	Persen	38	1.151.869.1 68	38	498.152.96 8	15	89.415.81 9	19	199.439.59 2	38	498.152.96 8	100	43			
				Pembangu nan dan Pengelolaa n Sarana Distribusi Perdagang an	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara			Persen	100	4.000.000.0 00	Persen	100	1.573.885.0 59	Persen	100	1.151.869.1 68	100	498.152.96 8	25	89.415.81 9	25	199.439.59 2	100	498.152.96 8	100	43			
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	7	4.000.000.0 00	Unit	7	1.573.885.0 59	Unit	7	1.151.869.1 68	7	498.152.96 8	7	89.415.81 9	7	199.439.59 2	7	498.152.96 8	100	43			
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawas an Harga Komodita s					Persen	100	38.981.136. 138	Persen	60	16.258.973. 100	Persen	70	17.877.464. 000	70	9.189.020.0 00	25	4.340.122. 000	25	5.079.945.0 00	70	9.189.020.0 00	100	51			
				Pengendali an Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	Persentase Jumlah barang dan harga yang disurvei			Persen	100	38.581.136. 138	Persen	100	16.258.973. 100	Persen	100	17.780.991. 000	100	9.092.547.0 00	25	4.340.122. 000	25	5.079.945.0 00	100	9.092.547.0 00	100	51			

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																						
								Laporan	260	999.108.000	Laporan	0	0	Laporan	52	162.607.00 0	52	162.607.00 0	0	0	0	0		52	162.607.00 0	100	100		
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																						
								Laporan	10	37.582.028. 138	Laporan	5	16.258.973. 100	Laporan	2	17.618.384. 000	2	8.929.940.0 00	1	4.340.122. 000	1	5.079.945.0 00	2	8.929.940.0 00	100	51			
				Pengawas an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk																								
								Persen	17,50	400.000.000	Persen		0	Persen	17	96.473.000		96.473.000	0	0	0	0		0	96.473.000	0	100		
						Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																						
								Laporan	24	200.000.000	Laporan	0	0	Laporan	6	50.200.000	0	50.200.000	0	0	0	0		0	50.200.000	0	100		

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PRO GRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp
																			KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
						Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%																						
								Laporan	24	200.000.000	Laporan	0	0	Laporan	6	46.273.000	0	46.273.000	0	0	0	0		0	46.273.000	0	100		
		PROGRAM PENGEMBAN GAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasark an SKA yang diterbitka n																				0	0	0	0			
								Juta \$	1000	1.052.710.000	Juta \$	716	41.053.500	Juta \$	950	343.566.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Penyeleng garaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti																	0	0	0	0				
						Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN				
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp.		KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.
																			KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
						Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi																						
								Produk	10	155.000.000	Produk	0	0	Produk	5	46.882.000		0	0	0	0		0	0	0	0			
		PROGRAM STANDARDIS ASI DAN PERLINDUNG AN KONSUMEN	Persentas e peningkat an Tertib Ukur																			0	0	0	0				
								Persen	5,99	830.148.050	Persen		8.514.000	Persen	6	93.868.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Pelaksana an Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawas an	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berla ku																0	0	0	0					
								Persen	95	830.148.050	Persen	105	8.514.000	Persen	90	93.868.000		0	0	0	0	0	0	0	0				
						Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina															0	0	0	0				
								Pelaku Usaha	500	630.148.050	Pelaku Usaha	50	8.514.000	Pelaku Usaha	100	93.868.000		0	0	0	0	0	0	0	0				
						Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal															0	0	0	0				
								Unit	10	200.000.000	Unit	0	0	Unit	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERINDUSTR IAN								14.694.156. 175			8.897.891.2 04			9.144.309.3 50		5.480.267.9 00		2.626.127. 820		3.696.260.8 20	0	5.480.267.9 00	0	60			
		PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI	Persentas e Pertamba han jumlah industri kecil dan menenga h di Kabupate							14.694.156. 175	Persen	9	8.897.891.2 04	Persen	9	9.144.309.3 50	9	5.480.267.9 00	0	2.626.127. 820	4	3.696.260.8 20	9	5.480.267.9 00	100	60			

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp
																			KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
			n/Kota																										
				Penyusuna n dan Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri Kabupaten /Kota	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pe mbinaan			Persen	70	14.694.156. 175	Persen	70	8.897.891.2 04	Persen	55	9.144.309.3 50	55	5.480.267.9 00	10	2.626.127. 820	20	3.696.260.8 20	55	5.480.267.9 00	100	60			
						Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokum en	1	300.000.000	Dokumen	0	0	Dokumen	1	314.355.00 0		0	0	0	0	0	0			0			
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokum en	5	495.400.000	Dokumen	0	0	Dokumen	1	100.275.00 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokum en	5	2.568.323.3 95	Dokumen	1	1.427.441.9 09	Dokumen	1	583.605.60 0	1	326.322.70 0	0	0	1	247.029.00 0		1	326.322.70 0	100	56		

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp		KINERJ A	Rp
																			KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokum en	5	200.000.000	Dokumen	1	71.453.300	Dokumen	1	50.099.500	1	22.692.000	0		0	0	1	22.692.000	100	45			
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokum en	5	11.130.432. 780	Dokumen	1	7.398.995.9 95	Dokumen	1	8.095.974.2 50	1	5.131.253.2 00	1	2.626.127. 820	1	3.449.231.8 20	1	5.131.253.2 00	100	63			
		UPTD METROLOGI LEGAL																											
		URUSAN PEMERINTA HAN PILIHAN																											
		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERDAGANG AN																											
		PROGRAM STANDARDIS ASI DAN PERLINDUNG AN KONSUMEN	Persentas e peningkat an Tertib Ukur					Persen	37,51	5.754.342.7 70	Persen	5	1.161.143.7 82	Persen	6	790.283.60 0	6	562.671.60 0	n/a	93.150.88 7	0	226.137.82 9	6	562.671.60 0	100	71			

N O	KO DE	URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH/PR OGRAM	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2024		KETERAN GAN		
								SATUA N	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp.	SATUAN	KINERJ A	Rp	KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.	KINERJ A	Rp.							
																							TW 1	TW 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14		15		16		17		
				Pelaksana an Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawas an	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkap nya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku																								
								Persen	95	5.754.342.7 70	Persen	105	1.161.143.7 82	Persen	90	790.283.60 0	90	562.671.60 0	15	93.150.88 7	35	226.137.82 9	90	562.671.60 0	100	71			
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang																20.500	562.671.60 0	100	71			
								Unit	23000	5.754.342.7 70	Unit	16.330	1.161.143.7 82	Unit	20.500	790.283.60 0	20.500	562.671.60 0	630	93.150.88 7	2.500	226.137.82 9							
TOTAL																													

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai berikut :

**TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM**

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi		Proyeksi		Satuan	Catatan Analisis
								Capaian					
				Tahun n- ² 2022	Tahun n- ¹ Tahun 2023	Tahun 2024 tahun n	Tahun n.¹ 2025	Tahun n- ² 2022	Tahun n- ¹ 2023	Tahun n 2024	Tahun n.¹ 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan			2,40%	2,95%	3,50%	4,10%	2.88	3,01	3,80	4,50	Persen	
2	Pertumbuhan jumlah IKM			8,60	8,70	8,80	9,00	8.64	9,55	8,90	10,50	Persen	
3	Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp / Orang)			60,00	65,00	68,00	70,00	60,01	68,26	69,00	75,00	Persen	
4	Pertumbuhan produksi IKM			3,00	4,00	5,00	6,00	3,02	4,58	5,50	6,50	Persen	
5	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok			<6%	<6%	<5%	<5%	<4%	<5,9%	<5%	<5%	Persen	
6	Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas;

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- **Kekuatan (Strengths)**

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik

4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

- **Kelemahan (weaknesses)**

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur di bidang Industri dan Perdagangan
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

- **Peluang (Opportunity)**

1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan *stake holder* lainnya

- **Tantangan (threat)-**

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum Pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang baik
3. Adanya Badan Pengelolaan Pulau Batam
4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perdagangan dan perindustrian yang berkualitas
5. Adanya kekayaan potensi industry dan perdagangan yang belum tergarap secara maksimal

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Batam adalah sebagai berikut :

➤ *Sektor Perindustrian*

- Kurang berkembangnya Industri Hilir
- Belum optimalnya pola kemitraan antara produsen/pemasok bahan baku dengan pengusaha industri hilir
- Kurang berkembangnya industri sekunder dan pusat pertumbuhan Agroindustri dan Agrokimia.
- Belum optimalnya industri logam untuk mendukung pembuatan mesin/peralatan pabrik yang menunjang Agroindustri terutama Agroindustri kecil dan rumah tangga.
- Belum berkembangnya industri barang modal yang mendukung pengembangan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- Belum berkembangnya industri penunjang, khususnya industri komponen untuk tujuan ekspor serta perusahaan-perusahaan rekayasa.
- Masih rendahnya produktifitas industri terutama industri dalam negeri yang menghasilkan produk bernilai tambah.

➤ *Sektor Perdagangan Dalam Negeri*

- Belum berkembangnya sistem perdagangan barang dan jasa yang terintegrasi dengan perdagangan lokal, regional dan global.
- Belum mantapnya sistem dan mekanisme distribusi barang, terutama kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- Masih Tingginya ketergantungan terhadap daerah produsen dan produk impor untuk pemenuhan kebutuhan sembako di Kota Batam.
- Produk import yang belum dapat memenuhi kebutuhan kota Batam dan menekan harga di pasar.

- Masih terbatasnya peralatan pendukung kemetrollogian dalam rangka tera ulang UTTP.
- *Sektor Perdagangan Luar Negeri*
 - Rendahnya daya saing produk ekspor yang berbasis sumberdaya lokal
 - Terbatasnya informasi dan promosi produk ekspor.
 - Belum optimalnya kerjasama ekonomi sub regional dan perdagangan lintas batas

Secara khusus permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah:

1. Struktur Industri yang tidak seimbang, dimana industri yang berkembang adalah Industri yang bersifat Footloose Industry dan minim keterkaitan dengan Sumber Daya Lokal.
2. Terbatasnya daya dukung Industri Kecil dan Menengah, karena industri yang berkembang bukan dengan Pola Industri Satelit atau saling terkait.
3. Belum tersedianya Infrastruktur Pendukung Pengembangan dan Penelitian Industri. Kawasan Industri Kecil khususnya industri yang berbasis Sumber Daya Kelautan (Maritime) Batam potensial dikembangkan Industri berbasis Maritim mengingat Batam merupakan Daerah Kepulauan.
4. Terbatasnya Fasilitas Ekspor bagi IKM.
5. Belum berkembangnya Industri Rumah Tangga di daerah Hinterland, sehingga barang hasil industri tersebut belum memenuhi mutu untuk diekspor.
6. Belum tersedianya sarana dan prasarana di dalam meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan.
7. Peraturan dibidang eksport dan import yang belum jelas pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bekas Batam Bintan Karimun

Sebagai Daerah Industri dan Perdagangan Kota Batam diharapkan mempunyai struktur industri yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi dengan bertumpu pada sumber daya manusia industrial dan niaga yang berkualitas. Masyarakat Batam diorientasikan mampu menciptakan dan memanfaatkan

peluang pada kondisi global sehingga mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri.

Sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan di Kota Batam diarahkan pada rencana strategis, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Industrial dan Niaga yang tangguh melalui rekayasa sosial dan teknologi, secara struktural maupun kultural dengan pendekatan partisipatif.
2. Penciptaan iklim usaha dan persaingan yang sehat, melalui peletakan landasan hukum dan peraturan yang konsisten dalam pengaturan, pembinaan serta pengembangan Industri dan Perdagangan.
3. Pengembangan Industri yang berorientasi ekspor dan berdaya saing
4. Pendayagunaan secara optimal potensi Sumber Daya Lokal
5. Pengembangan Industri dan Dagang Kecil Menengah termasuk industri rumah tangga yang berbasis ekonomi rakyat.
6. Pengembangan energi alternatif sebagai sumber energi terbarukan untuk wilayah hinterland dan tersedianya pilihan bahan bakar selain dari minyak bumi seperti gas dll;
7. Pengembangan sistem pendukung usaha melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas dan kemudahan perizinan di sektor industri dan perdagangan.
8. Pengembangan sistem informasi dan promosi peluang usaha dan potensi investasi industri dan perdagangan melalui peningkatan akses teknologi, akses permodalan, dan akses pasar.
9. Peningkatan koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan bersama instansi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang bersifat aliansi strategis untuk mempercepat laju pertumbuhan sektor industri dan perdagangan secara adil dan berkesinambungan.
10. Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan universitas untuk mencari Inovasi Baru bagi Industri Kecil

-dan Menengah serta penyediaan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan industry yang ada.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terdapat perubahan anggaran namun Kegiatan-kegiatan tetap dapat dirumuskan menjadi Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
Tahun Anggaran 2024

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			34.709.194.979	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			24.401.119.599	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	14.353.028.711	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	14.365.348.531	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	12.409.799.155	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	13.343.157.936	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	12.308.099.155	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	13.343.157.936	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	101.700.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	449.662.380	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	51.954.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.274.880	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	134.622.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.226.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	86.848.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.077.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	178.640.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	35.728.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	208.675.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	0	0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	46.865.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	161.810.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	964.352.176	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	689.106.595	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	964.352.176	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	689.106.595	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	100 Persen	320.540.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	100 Persen	281.130.000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	237.820.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	237.820.000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	41.440.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	2.030.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 Persen	99.115.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	100 Persen	13.396.500	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100 Persen	49.897.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	0	
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	2 Laporan	49.897.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100 Persen	49.218.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100 Persen	13.396.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8500 Dokumen	49.218.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8500 Dokumen	13.396.500	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	37.74 Persen	1.151.869.168	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	37.74 Persen	498.152.968	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara	100 Persen	1.151.869.168	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara	100 Persen	498.152.968	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	1.151.869.168	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	498.152.968	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 Persen	17.877.464.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	70 Persen	8.929.940.000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei	100 Persen	17.780.991.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei	100 Persen	8.929.940.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	52 Laporan	162.607.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	17.618.384.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	8.929.940.000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	0	96.473.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	0	0	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	50.200.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0		

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	46.273.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	950 (juta \$)	343.566.500	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	950 (juta \$)	31.610.000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	50,00 Persen	343.566.500	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	50,00 Persen	31.610.000	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	89.353.500	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	31.610.000	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	207.331.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0	0	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi Materi Promosi	5 Produk	46.882.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi Materi Promosi	0	0	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5.67 Persen	93.868.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5.99 Persen	0	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90 Persen	93.868.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	89 Persen	0	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 orang	93.868.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	0	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			9.144.309.350	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			7.262.648.400	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 Persen	9.144.309.350	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8.80 Persen	7.262.648.400	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	55 Persen	9.144.309.350	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	55 Persen	7.262.648.400	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pemabngunan Industri	1 Dokumen	314.355.000					

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	100.275.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	583.605.600	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	326.322.700	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	50.099.500	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	60.142.500	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	8.095.974.250	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	6.876.183.200	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			790.283.600,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			562.671.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5.67 Persen	790.283.600	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	5.67 Persen	562.671.600	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90 Persen	790.283.600	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90 Persen	562.671.600	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20500 Unit	790.283.600	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20500 Unit	562.671.600	
TOTAL				43.853.504.329,00				31.663.767.999,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem SIPD yang diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari
Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Batam

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	NIHIL				

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA, Anggaran menjadi Rp. 13.396.500

B. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan :

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, Anggaran naik dari Rp. 498.152.968 menjadi Rp. 499.953.040 bertambah Rp. 1.800.072

C. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam satu (1) Kabupaten/Kota, dari Rp. 162.607.000 menjadi Rp. 0,-
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Anggaran tetap menjadi Rp. 8.929.940.000,-

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dari Rp. 50.200.000 menjadi Rp. 0,-
- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Pestisida Bersubsidi dari Rp. 46.273.000 menjadi Rp. 0,-

D. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pameran Dagang Lokal menjadi Rp. 31.610.000

E. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera tera ulang dan pengawasan.

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang anggaran turun dari Rp. 562.671.600,- menjadi Rp. 547.891.880,- berkurang (Rp. 14.779.720,-)

F. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Anggaran tidak mengalami perubahan Rp. 326.322.700
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri anggaran naik dari Rp. 22.692.000,- Menjadi Rp. 60.142.500,-
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Anggaran mengalami penyesuaian dari Rp. 5.131.253.200,- menjadi Rp. 5.131.249.200,- (berkurang Rp. 4.000,-)

G. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Anggaran naik dari Rp. 12.229.006.644,- menjadi Rp. 12.775.243.770,-, bertambah Rp.546.237.126,-

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Anggaran tetap dari Rp. 16.226.000 menjadi Rp. 16.226.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran Tetap dari Rp. 35.728.000,- menjadi Rp. 35.728.000,-

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor, Anggaran turun dari Rp. 689.106.595,- menjadi Rp. 645.940.811,- , berkurang Rp. (43.165.784,-)

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran naik dari Rp.39.780.000,- menjadi Rp. 43.540.000 bertambah Rp. 3.760.000
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Anggaran naik dari Rp.237.820.000,- menjadi Rp. 267.580.000,- bertambah Rp. 29.760.000,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran tetap Rp. 2.030.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, anggaran tetap Rp. 1.500.000,-

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.1 dan tabel 3.2. Rencana Kerja perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah ini:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Perubahan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024

FILTER	KODE	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
SKPD	3.31.3.30.0.00.01.0000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.981.309.707	29.328.294.401	346.984.694	
SUBUNIT	3.31.3.30.0.00.01.0000	3.31.3.30.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.418.638.107	28.780.402.521	361.764.414	
PROGRAM	3.30.01	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.251.197.239	13.787.788.581	536.591.342	
KEG	3.30.01.2.02	3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.229.006.644	12.775.243.770	546.237.126	
SUBKEG	3.30.01.2.02.0001	3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.229.006.644	12.775.243.770	546.237.126	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN - PKKK
KEG	3.30.01.2.06	3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.954.000	51.954.000	0	
SUBKEG	3.30.01.2.06.0002	3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.226.000	16.226.000	0	
SUBKEG	3.30.01.2.06.0009	3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.728.000	35.728.000	0	
KEG	3.30.01.2.08	3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.106.595	645.940.811	-43.165.784	
SUBKEG	3.30.01.2.08.0004	3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.106.595	645.940.811	-43.165.784	Penyesuaian Lulus PKKK

FILTER	KODE	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
KEG	3.30.01.2.09	3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.130.000	314.650.000	33.520.000	
SUBKEG	3.30.01.2.09.0001	3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.780.000	43.540.000	3.760.000	Penyesuaian Standar Satuan Harga
SUBKEG	3.30.01.2.09.0002	3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.820.000	267.580.000	29.760.000	Penyesuaian Standar Satuan Harga
SUBKEG	3.30.01.2.09.0006	3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000	0	
SUBKEG	3.30.01.2.09.0009	3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	0	
PROGRAM	3.30.02	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		13.396.500	13.396.500	
KEG	3.30.02.2.07	3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		13.396.500	13.396.500	
SUBKEG	3.30.02.2.07.0001	3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		13.396.500	13.396.500	Pemenuhan RPJMD
PROGRAM	3.30.03	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	498.152.968	499.953.040	1.800.072	
KEG	3.30.03.2.01	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	498.152.968	499.953.040	1.800.072	
SUBKEG	3.30.03.2.01.0002	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	498.152.968	499.953.040	1.800.072	Penyesuaian Belanja BPJS

FILTER	KODE	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
PROGRAM	3.30.04	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	9.189.020.000	8.929.940.000	-259.080.000	
KEG	3.30.04.2.02	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	9.092.547.000	8.929.940.000	-162.607.000	
SUBKEG	3.30.04.2.02.0001	3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	162.607.000	0	-162.607.000	Peyesuaian Prioritas Kegiatan
SUBKEG	3.30.04.2.02.0003	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8.929.940.000	8.929.940.000	0	
KEG	3.30.04.2.03	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.473.000	0	-96.473.000	
SUBKEG	3.30.04.2.03.0002	3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	50.200.000	0	-50.200.000	Peyesuaian Prioritas Kegiatan
SUBKEG	3.30.04.2.03.0003	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	46.273.000	0	-46.273.000	Peyesuaian Prioritas Kegiatan
PROGRAM	3.30.05	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		31.610.000	31.610.000	
KEG	3.30.05.2.01	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		31.610.000	31.610.000	
SUBKEG	3.30.05.2.01.0003	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal		31.610.000	31.610.000	Pemenuhan RPJMD
PROGRAM	3.31.02	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.480.267.900	5.517.714.400	37.446.500	

FILTER	KODE	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
KEG	3.31.02.2.01	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.480.267.900	5.517.714.400	37.446.500	
SUBKEG	3.31.02.2.01.0003	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	326.322.700	326.322.700	0	
SUBKEG	3.31.02.2.01.0004	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	22.692.000	60.142.500	37.450.500	Tambahan DBH-CHT
SUBKEG	3.31.02.2.01.0005	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.131.253.200	5.131.249.200	-4.000	Penyesuaian Standar Satuan Harga
SUBUNIT	3.31.3.30.0.00.01.0001	3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD METROLOGI LEGAL	562.671.600	547.891.880	-14.779.720	
PROGRAM	3.30.06	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	562.671.600	547.891.880	-14.779.720	
KEG	3.30.06.2.01	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	562.671.600	547.891.880	-14.779.720	
SUBKEG	3.30.06.2.01.0001	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	562.671.600	547.891.880	-14.779.720	Penyesuaian Lulus PKKK

Tabel 3.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BATAM
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							43.853.504.329,00	28.981.309.707,00	31.663.767.999,00	-12.189.736.330,00							25.937.313.040,00		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.853.504.329,00	28.981.309.707,00	31.663.767.999,00	-12.189.736.330,00							25.937.313.040,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							34.709.194.979,00	23.501.041.807,00	24.401.119.599,00	-10.308.075.380,00							23.337.313.040,00		
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti				100 %	100 %	99.115.000,00	0,00	13.396.500,00	-24.115.000,00							75.000.000,00		
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota				100 Persen	100 Persen	49.897.000,00	0,00	0,00	-49.897.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				2 Laporan	2 Laporan	49.897.000,00	0,00	0,00	-49.897.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				100 Persen	100 Persen	49.218.000,00	0,00	13.396.500,00	-35.821.500,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																			
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				8500 Dokumen	8500 Dokumen	49.218.000,00	0,00	13.396.500,00	-35.821.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik				37.74 %	37.74 %	1.151.869.168,00	498.152.968,00	498.152.968,00	-151.869.168,00							1.000.000.000,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pilihara				100 Persen	100 Persen	1.151.869.168,00	498.152.968,00	498.152.968,00	-653.716.200,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				7 Unit	7 Unit	1.151.869.168,00	498.152.968,00	498.152.968,00	-653.716.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas				70 %	70 %	17.877.464.000,00	9.189.020.000,00	8.929.940.000,00	-8.540.408.111,00							8.337.055.889,00		
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah barang dan harga yang disurvei				100 Persen	100 Persen	17.780.991.000,00	9.092.547.000,00	8.929.940.000,00	-8.851.051.000,00			-	-	-		8.237.055.889,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				52 Laporan	52 Laporan	162.607.000,00	162.607.000,00	0,00	-162.607.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	17.618.384.000,00	8.929.940.000,00	8.929.940.000,00	-8.688.444.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-		7.987.055.889,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk				16.50 Persen	16.50 Persen	96.473.000,00	96.473.000,00	0,00	-96.473.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				6 Laporan	6 Laporan	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	-50.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				6 Laporan	6 Laporan	46.273.000,00	46.273.000,00	0,00	-46.273.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan				950 (juta \$)	950 (juta \$)	343.566.500,00	0,00	31.610.000,00	-188.566.500,00							155.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti				50.00 Persen	50.00 Persen	343.566.500,00	0,00	31.610.000,00	-311.956.500,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	89.353.500,00	0,00	31.610.000,00	-57.743.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	207.331.000,00	0,00	0,00	-207.331.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				5 Produk	5 Produk	46.882.000,00	0,00	0,00	-46.882.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Terbit Ukur				5,67 %	5,67 %	884.151.600,00	562.671.600,00	562.671.600,00	215.948.400,00							1.100.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan pengukurannya (UUTP) berstandar tera sah yang berlaku				90,00 Persen	90,00 Persen	884.151.600,00	562.671.600,00	562.671.600,00	-321.480.000,00			-	- -	-		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	100 Orang	93.868.000,00	0,00	0,00	-93.868.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	14.353.028.711,00	13.251.197.239,00	14.365.348.531,00	-1.682.771.560,00							12.670.257.151,00	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	12.409.799.155,00	12.229.006.644,00	13.343.157.936,00	933.358.781,00			-	- -	-		10.541.133.766,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	12.308.099.155,00	12.229.006.644,00	13.343.157.936,00	1.035.058.781,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			10.451.893.766,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	101.700.000,00	0,00	0,00	-101.700.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			89.240.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		57.881.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			57.881.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	449.662.380,00	51.954.000,00	51.954.000,00	-397.708.380,00			-	- -	-		350.762.645,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.274.880,00	0,00	0,00	-20.274.880,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.496.880,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	134.622.500,00	16.226.000,00	16.226.000,00	-118.396.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			126.765.060,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	86.848.000,00	0,00	0,00	-86.848.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.013.705,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.077.000,00	0,00	0,00	-22.077.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	178.640.000,00	35.728.000,00	35.728.000,00	-142.912.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.187.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	208.675.000,00	0,00	0,00	-208.675.000,00			-	-	-		150.491.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	46.865.000,00	0,00	0,00	-46.865.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.093.125,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	161.810.000,00	0,00	0,00	-161.810.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.396.125,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	964.352.176,00	689.106.595,00	689.106.595,00	-275.245.581,00			-	-	-		1.310.388.240,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	964.352.176,00	689.106.595,00	689.106.595,00	-275.245.581,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.310.388.240,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi				-	100 %	320.540.000,00	281.130.000,00	281.130.000,00	-39.410.000,00			-	-	-		259.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			39.780.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	237.820.000,00	237.820.000,00	237.820.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-			168.960.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	44 Unit	41.440.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	-39.410.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.350.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							9.144.309.350,00	5.480.267.900,00	7.262.648.400,00	-1.881.660.950,00							2.600.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota				8,80 %	8,80 %	9.144.309.350,00	5.480.267.900,00	7.262.648.400,00	-6.544.309.350,00							2.600.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan				55,00 Persen	55,00 Persen	9.144.309.350,00	5.480.267.900,00	7.262.648.400,00	-1.881.660.950,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		2.600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	314.355.000,00	0,00	0,00	-314.355.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Penyelidikan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.275.000,00	0,00	0,00	-100.275.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	583.605.600,00	326.322.700,00	326.322.700,00	-257.282.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PER PANJANGAN IZIN MEMPEKE RIJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.099.500,00	22.692.000,00	60.142.500,00	10.043.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TENBAKAU (CHT)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8.095.974.250,00	5.131.253.200,00	6.876.183.200,00	-1.219.791.050,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM RETRIBUSI PER PANJANGAN IZIN MEMPEKE RIJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi. 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.			1.850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		URUPD METROLOGI LEGAL							43.853.504.329,00	28.981.309.707,00	31.663.767.999,00	-12.189.736.330,00							25.937.313.040,00	
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.853.504.329,00	28.981.309.707,00	31.663.767.999,00	-12.189.736.330,00							25.937.313.040,00	
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan Terbit Ukur				5,67 %	5,67 %	884.151.600,00	562.671.600,00	562.671.600,00	215.848.400,00							1.100.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				90,00 Persen	90,00 Persen	884.151.600,00	562.671.600,00	562.671.600,00	-321.480.000,00			-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				20500 Unit	20500 Unit	790.283.600,00	562.671.600,00	562.671.600,00	-227.612.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		J U M L A H							43.853.504.329,00	28.981.309.707,00	31.663.767.999,00	-402.242.035.745,00							25.937.313.040,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024, Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

4.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 adalah:

- a. Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026; dan
- b. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2024 menjadi pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI